
Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD, Transparansi Laporan Keuangan, Kepatuhan Regulasi, dan Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022-2024

Siti Auliana Rahamah¹, Safriansyah^{2*}, Nurul Hayati³, Soelistijono Boedi^{4*}

1,2,3,4 Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

*) Correspondent Author: safriansyah@ibitek.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine the influence of the DPRD supervisory function, financial report transparency, regulatory compliance, and budget utilization effectiveness on the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Barito Kuala Regency for fiscal years 2022 to 2024. Although the regency has received an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Board (BPK), weaknesses remain in its internal control system, including delays in following up on audit recommendations. This study is grounded in *Agency Theory* and Public Accountability Theory, positioning the DPRD as the representative of the principal in overseeing the regional government as the agent responsible for managing public funds. A quantitative approach was employed, with data collected through structured questionnaires distributed to 70 respondents consisting of DPRD members and officials of the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD), using a five-point Likert scale. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression. All instruments were valid and reliable, and all classical assumptions were satisfied. The results show that all four independent variables have a positive and significant partial effect on APBD management, with the regression equation $Y = -0.591 + 0.109X_1 + 0.240X_2 + 0.295X_3 + 0.461X_4$ and an Adjusted R^2 of 77.2%. Budget utilization effectiveness emerged as the most dominant variable, followed by regulatory compliance, financial report transparency, and the DPRD supervisory function. These findings suggest that improving APBD management requires performance-based budgeting, enhanced public access to financial information, consistent regulatory adherence, and substantive legislative oversight.

Keywords: dprd supervisory function, financial report transparency, regulatory compliance, budget utilization effectiveness, apbd management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fungsi pengawasan DPRD, transparansi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2022-2024. Meskipun Kabupaten Barito Kuala telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern, antara lain keterlambatan tindak lanjut rekomendasi audit. Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* dan Teori Akuntabilitas Publik sebagai landasan, yang memandang DPRD sebagai representasi *principal* dalam mengawasi pemerintah daerah selaku *agent* pengelola anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 70 responden yang terdiri dari anggota DPRD

dan pejabat BKAD Kabupaten Barito Kuala, menggunakan Skala *Likert* 1-5. Data dianalisis dengan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel, serta seluruh asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan APBD, dengan persamaan regresi $Y = -0,591 + 0,109X_1 + 0,240X_2 + 0,295X_3 + 0,461X_4$ dan nilai Adjusted R^2 sebesar 77,2%. Efektivitas penggunaan anggaran terbukti sebagai variabel paling dominan, diikuti oleh kepatuhan regulasi, transparansi laporan keuangan, dan fungsi pengawasan DPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan APBD memerlukan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan akses publik terhadap informasi keuangan, kepatuhan regulasi yang konsisten, serta pengawasan legislatif yang substantif.

Keywords: fungsi pengawasan dprd, transparansi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, pengelolaan apbd

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di era otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan, tetapi juga sebagai proses strategis yang menentukan arah pembangunan daerah, komitmen politik, dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat (Halim & Kusufi, 2017). Setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, serta pembahasan hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya (Bastian, 2019). Efektivitas pengawasan ini tidak hanya bergantung pada kerangka regulatif, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, akses informasi, dan kemandirian politik DPRD terhadap eksekutif (Faizal, 2023).

Selain pengawasan legislatif, transparansi laporan keuangan menjadi syarat fundamental bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui

pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Namun demikian, berbagai temuan pemantauan publik menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses masyarakat.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek fundamental lain dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, mencakup kesesuaian praktik pengelolaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbagai peraturan teknis lainnya (Halim & Kusufi, 2017). Sementara itu, efektivitas penggunaan anggaran mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran perencanaan tercapai melalui penggunaan anggaran yang tersedia (Mahmudi, 2019). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi anggaran di berbagai daerah, terutama pada belanja modal, yang mengindikasikan kurangnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Kabupaten Barito Kuala, meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun anggaran 2022–2024, masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian intern, antara lain keterlambatan tindak lanjut rekomendasi audit tahun sebelumnya, kelemahan pengelolaan aset daerah, serta sejumlah program yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif DPRD sebagai pengawas keuangan daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan Teori Akuntabilitas Publik sebagai landasan analisis. *Agency Theory* menjelaskan perlunya mekanisme monitoring untuk mengatasi asimetri informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, yang dalam penelitian ini diwujudkan melalui fungsi pengawasan DPRD dan transparansi laporan keuangan. Teori Akuntabilitas Publik menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui kepatuhan regulasi, keterbukaan informasi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh fungsi pengawasan DPRD, transparansi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2022–2024, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan legislatif di tingkat daerah.

2. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD, Transparansi Laporan Keuangan, Kepatuhan Regulasi, dan Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022-2024



E-Journal STIE Indonesia Banjarmasin
<https://journal-stieibjm.com>

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemberi mandat) dan *agent* (penerima mandat), yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, masyarakat dan DPRD bertindak sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang mengelola keuangan daerah melalui APBD. Permasalahan keagenan muncul ketika pemerintah daerah memiliki informasi lebih banyak dibandingkan masyarakat (*information asymmetry*), sehingga diperlukan mekanisme pengendalian berupa pengawasan DPRD, transparansi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas penggunaan anggaran (Eisenhardt, 1989).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2018). Nordiawan dan Hertianti (2020) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam kerangka ini, fungsi pengawasan DPRD merupakan mekanisme utama akuntabilitas horizontal, transparansi laporan keuangan mengurangi asimetri informasi, kepatuhan regulasi mewujudkan akuntabilitas hukum, dan efektivitas penggunaan anggaran mencerminkan akuntabilitas program dan kinerja (*performance accountability*).

Fungsi pengawasan DPRD merupakan mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif yang mencakup pengawasan atas penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD (Faisol & Anadi, 2022). Terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan apriori (sebelum pelaksanaan anggaran) dan aposteriori (setelah pelaksanaan anggaran), yang bersama-sama menjalankan prinsip *checks and balances* terhadap eksekutif. Penelitian Anggara dkk. (2023) dan Yuliawati dan Ardiansyah (2025) membuktikan bahwa fungsi pengawasan DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui deteksi dini penyimpangan dan penguatan *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1: Fungsi Pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

Transparansi laporan keuangan adalah prinsip keterbukaan yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan yang jelas, akurat, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses publik (Bastian, 2019). Dari perspektif *Agency Theory*, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengungkapan yang mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan

sosial (*social accountability*) yang efektif. Penelitian Ramadhan dkk. (2021), Latifah dan Firmansyah (2021), serta Sapitri dan Arza (2024) menemukan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2: Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

Kepatuhan regulasi mengacu pada tingkat kesesuaian praktik pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010), serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2017). Dari perspektif Teori Akuntabilitas Publik, kepatuhan regulasi merupakan wujud akuntabilitas hukum yang menjadi fondasi bagi dimensi akuntabilitas lainnya (Nordian & Hertianti, 2020). Penelitian Suryani dkk. (2020) dan Faisol dan Anadi (2022) membuktikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: Kepatuhan Regulasi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

Efektivitas penggunaan anggaran mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran perencanaan tercapai melalui penggunaan anggaran yang tersedia, bukan sekadar seberapa besar anggaran terserap (Mahmudi, 2019). Dalam kerangka Teori Akuntabilitas Publik, efektivitas penggunaan anggaran merupakan manifestasi akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) tertinggi karena berkaitan langsung dengan dampak nyata bagi masyarakat. Penelitian Anggara dkk. (2023) dan Firdaus dan Dewi (2023) menemukan bahwa efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H4: Efektivitas Penggunaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

3. Metode Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala periode 2022–2024 (35 orang) dan pejabat struktural Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah (35 orang), sehingga total responden berjumlah 70 orang. Karena populasi relatif kecil, penelitian

menggunakan metode sensus. Kuesioner disebarikan pada 20 Februari–25 Maret 2026, dengan setiap variabel diukur melalui lima pernyataan menggunakan Skala *Likert* 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Fungsi Pengawasan DPRD (X1), Transparansi Laporan Keuangan (X2), Kepatuhan Regulasi (X3), dan Efektivitas Penggunaan Anggaran (X4), sedangkan variabel dependen adalah Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala (Y). Definisi operasional dan indikator masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dengan korelasi *Pearson* dan reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha*), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linear berganda dengan model $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$, menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 26. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji *t*) dan simultan (uji *F*), dengan kriteria signifikansi $\alpha = 0,05$

4. Analisis dan Pembahasan

Karakteristik dan Deskripsi Jawaban Responden

Responden penelitian berjumlah 70 orang, terdiri atas anggota DPRD dan pejabat BKAD Kabupaten Barito Kuala, didominasi laki-laki (68,57%) dan kelompok usia 39–49 tahun (35,71%), dengan mayoritas berpendidikan Strata Satu (52,86%). Komposisi ini mencerminkan bahwa responden memiliki pengalaman dan kapasitas intelektual yang memadai untuk memahami mekanisme pengelolaan dan pengawasan APBD.

Hasil deskripsi jawaban responden menunjukkan bahwa keempat variabel independen berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi: kepatuhan regulasi memperoleh rata-rata tertinggi (4,03), diikuti efektivitas penggunaan anggaran (3,98), transparansi laporan keuangan (3,95), dan fungsi pengawasan DPRD (3,86). Hal ini mengindikasikan bahwa keempat aspek tata kelola tersebut secara umum telah berjalan baik di Kabupaten Barito Kuala, meskipun aspek independensi pengawasan DPRD dan aksesibilitas dokumen keuangan melalui media publik masih memiliki ruang perbaikan.

Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kelima variabel penelitian memiliki nilai *r* hitung berkisar 0,505–0,773, lebih besar dari *r* tabel (0,232), sehingga seluruh instrumen dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Fungsi Pengawasan DPRD (X1)	0,722	Reliabel
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	0,704	Reliabel
Kepatuhan Regulasi (X3)	0,691	Reliabel
Efektivitas Penggunaan Anggaran (X4)	0,737	Reliabel
Pengelolaan APBD (Y)	0,653	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,093 ($> 0,05$), yang didukung oleh grafik histogram berbentuk lonceng dan sebaran titik pada grafik P-P Plot yang mengikuti garis diagonal, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 ($X1 = 0,625$; $X2 = 0,480$; $X3 = 0,165$; $X4 = 0,753$), sehingga model bebas dari heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* seluruh variabel di atas 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 (berkisar 1,068–2,750), sehingga model dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, model regresi dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = -0,591 + 0,109X1 + 0,240X2 + 0,295X3 + 0,461X4$. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,772, yang berarti keempat variabel independen mampu menjelaskan 77,2% variasi pengelolaan APBD, sedangkan 22,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 59,491 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Hasil uji parsial (uji t) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi dan Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD, Transparansi Laporan Keuangan, Kepatuhan Regulasi, dan Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022-2024



E-Journal STIE Indonesia Banjarmasin
<https://journal-stieibjm.com>

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-0,591	-1,554	0,125	-
Fungsi Pengawasan DPRD (X1)	0,109	2,154	0,035	H1 diterima
Transparansi Laporan Keuangan (X2)	0,240	3,123	0,003	H2 diterima
Kepatuhan Regulasi (X3)	0,295	3,151	0,002	H3 diterima
Efektivitas Penggunaan Anggaran (X4)	0,461	5,243	0,000	H4 diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Keempat hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga H1, H2, H3, dan H4 seluruhnya diterima. Efektivitas penggunaan anggaran (X4) memiliki koefisien regresi terbesar (0,461), diikuti kepatuhan regulasi (0,295), transparansi laporan keuangan (0,240), dan fungsi pengawasan DPRD (0,109), menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran merupakan faktor paling dominan dalam menentukan kualitas pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala.

Pembahasan

Fungsi pengawasan DPRD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD (H1 diterima), sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menempatkan DPRD sebagai representasi *principal* yang mengawasi *agent* (pemerintah daerah) agar tidak memanfaatkan asimetri informasi secara oportunistik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Anggara dkk. (2023) dan Swandewi dan Dewi (2023), yang menunjukkan bahwa intensitas pengawasan legislatif mendorong eksekutif untuk lebih berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.

Transparansi laporan keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan (H2 diterima), memperkuat argumen bahwa keterbukaan informasi keuangan berfungsi sebagai mekanisme pengungkapan yang mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* (Eisenhardt, 1989), sekaligus menjadi prasyarat *good governance* dalam dimensi *accountability* dan *transparency*. Temuan ini konsisten dengan Firdaus dan Dewi (2023) dan Ramadhan dkk. (2021), yang menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya.

Kepatuhan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD (H3 diterima), sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan regulasi merupakan wujud

akuntabilitas hukum (*legal accountability*) yang menjadi fondasi bagi dimensi akuntabilitas yang lebih tinggi (Nordiawan & Hertianti, 2020). Temuan ini sejalan dengan Suryani dkk. (2020) dan Faisol dan Anadi (2022), yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keuangan mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Efektivitas penggunaan anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sekaligus menjadi variabel paling dominan (H4 diterima). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh proses pengawasan, transparansi, dan kepatuhan, tetapi oleh sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu mencapai tujuan pembangunan daerah secara nyata – sebuah manifestasi akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) tertinggi (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018). Hasil ini konsisten dengan Sapitri dan Arza (2024) dan Ramadhan dkk. (2021), yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 70 responden anggota DPRD dan pejabat BKAD Kabupaten Barito Kuala, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD, transparansi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas penggunaan anggaran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2022–2024, dengan keempat variabel secara simultan mampu menjelaskan 77,2% variasi pengelolaan APBD. Efektivitas penggunaan anggaran merupakan variabel yang paling dominan, diikuti oleh kepatuhan regulasi, transparansi laporan keuangan, dan fungsi pengawasan DPRD. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah memerlukan penguatan yang menyeluruh pada keempat aspek tata kelola tersebut, dengan prioritas utama pada efektivitas penggunaan anggaran.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya meliputi satu kabupaten dan penggunaan data persepsional melalui kuesioner, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, sementara pengelolaan APBD dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model.

Berdasarkan temuan, disarankan agar DPRD meningkatkan kualitas fungsi pengawasan secara lebih substansial melalui peningkatan frekuensi rapat evaluasi dan penguatan kapasitas anggota dalam menganalisis laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah disarankan mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten dan memperluas akses publik terhadap informasi keuangan melalui portal keuangan daerah. Inspektorat daerah disarankan mengembangkan audit internal berbasis risiko serta memperkuat koordinasi dengan DPRD. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti sistem pengendalian internal atau partisipasi masyarakat dalam penganggaran, serta memperluas cakupan wilayah penelitian

Daftar Pustaka

- Anggara, S., Nugraha, A., & Priyanto, H. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 145–158.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Penerbit Erlangga.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Faisol, M., & Anadi, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Regulasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 189–201.
- Faizal, R. (2023). Analisis Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 267–282.
- Firdaus, A., & Dewi, S. P. (2023). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 112–128.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (5th ed.). Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Latifah, N., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(2), 156–172.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). Penerbit Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.

-
- Ramadhan, F., dkk. (2021). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 33–48.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sapitri, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 3(1), 67–82.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Suryani, E., Purnamasari, P., & Darma, E. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 4(1), 27–58.
- Swandewi, A. A., & Dewi, N. L. P. S. (2023). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(2), 298–315.
- Yuliawati, E., & Ardiansyah, M. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 45–61.